

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Asas Legalitas

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas. Asas ini pertama kali di rumuskan dalam pasal *declaration des droits de l'homme ductoyen* (1779), semacam undang-undang dasar yang di bentuk pada masa pecahnya Revolusi Perancis. Asas legalitas oleh Von Feuerbach (1775-1833) dirumuskan dalam bahasa latin sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sina praevia lege*” artinya, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Sebelum dikenal asas legalitas di kenal asas yang di namakan “*crime extra ordinaria*” artinya kejahatan-kejahatan yang tidak di sebut oleh Undang-Undang. Asas legalitas berpangkal pada asas liberalism/individualisme, dalam arti memberikan jaminan perlindungan pada perorangan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Di Negara-negara totaliter asas ini pernah di tinggalkan, di USSR asas legalitas di hapus pada tahun 1926 akan tetapi pada tahun 1958 dicantumkan kembali. Rezim Nazi pernah memperkenankan penggunaan analogi dalam hukum pidana, akan tetapi ketentuan demikian ditiadakan pada tahun 1945.⁸

1. Pengertian Asas Legalitas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001, hlm 11.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam pasal tersebut juga terdapat kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan Undang-undang Pidana, ini berarti bukan Undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain yang berisi perumusan delik dan ancaman pidana.⁹

2. Konsekwensi Dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun ketentuan mengenai pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:¹⁰

- a. Suatu tindak pidana harus di rumuskan/disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Adapun konsekuensi mengenai dua hal di atas :

- a. Konsekwensi pertama dari hal yang pertama ialah bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana juga tidak dapat dipidana.

⁹ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, cetakan ke III edisi revisi 2008, diterbitkan oleh rineka cipta Jakarta, hlm 43.

¹⁰ Sudarto, **Hukum Pidana 1**, cetakan ke 2, tahun 1990, diterbitkan oleh yayasan sudarto d\l Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm 22-24.

b. Konsekwensi kedua ialah adanya pendapat, bahwa adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (ratio legis) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang.

c. Hal yang kedua tersimpul dalam pasal 1 angka 1 adalah aturan undang-undang itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku retro-aktif (berlaku surut).

Walaupun menurut pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dianut asas legalitas, namun dahulu sewaktu masih adanya pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, dimungkinkan oleh Undang-undang nomor 1 (drt) tahun 1951 pasal 5 angka 3 butir B hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum tiga bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada pdanannya didalam KUHP.¹¹ Dalam hukum positif kita juga mengenali adanya asas ius curianovit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:¹²

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

¹¹ Ibid, hlm 42.

¹² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Jika hakim di hadapkan pada situasi dan kondisi seperti di atas, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau yang biasa kita sebut *rechtsvinding* yang dapat di artikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.¹³ Hal itu juga di justifikasi dalam Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*¹⁴

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.

Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, banyak pergeseran yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah bergesernya sistem kelembagaan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menganut sistem

¹³ Sudikno Mertokusumo, dan Mr.A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum** diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan : Konsorsium Ilmu Hukum, departemen pendidikan dan kebudayaan dan the asian foundation, hlm 4.

¹⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

“pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan *check and balances*” antara lembaga negara.¹⁵

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” . oleh karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.¹⁶ Maka dapat dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak pada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain, yaitu:¹⁷

Table 1
Tentang Pemisahan Kekuasaan Negara Indonesia berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Kekuasaan Negara		
Legislatif	Eksekutif	Yudikatif
MPR	Presiden dan Wakil Presiden	Mahkamah Agung
DPR		Mahkamah Konstitusi
DPD		

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, **Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945**, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 82-83.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, 2010, hlm 129.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, **Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, (online), <http://www.findamo.com/search.html?category=web&ch=8&q=kedudukan+mahkamah+agung+dan+mahkamah+konstitusi.pdf>, (5 May 2015).

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (Eksekutif) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (Legislatif). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

C. Kajian Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang

kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa; *“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*¹⁸

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ada 4 lingkungan peradilan yang ada didalamnya. Lingkungan peradilan tersebut dibedakan menurut bidang hukum yang menguasai objek sengketa sebagai yuridisnya dan golongan masyarakat yang pencari keadilan. Hal ini di atur dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:¹⁹

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”

1. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung

Dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan ;

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

¹⁹ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”²⁰ Sedangkan dalam Pasal 45A ayat 1 menyatakan ; “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.”²¹

2. Implikasi Adanya Tingkat Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengenal adanya tingkat pengadilan, sehingga ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung. Implikasi adanya tingkat pengadilan tersebut, bahwa pengadilan yang lebih tinggi, atau terlebih lagi pengadilan tertinggi memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bagi pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan tertinggi dalam praktik telah berjalan, yaitu pengawasan terhadap perbuatan pengadilan yang lebih rendah melalui mekanisme yudisial, yang disebut dengan upaya hukum, yaitu banding, kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan.²²

Upaya hukum adalah “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal

²⁰ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

²¹ Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3.

²² Ahmad Fadli Sumadi, **Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan**, setara pers, Malang, cetakan I, April 2013, hlm 131.

serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.”²³ Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

1.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni, Pemeriksaan tingkat banding; terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap; putusan bebas; Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; Putusan dalam acara cepat, kecuali terhadap putusan perampasan kemerdekaan.²⁴

1.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang diajukan jaksa agung dan terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni;

a) *Kasasi Demi Kepentingan Umum* adalah upaya hukum terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

b) *Peninjauan kembali Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh*

Kekuatan Hukum Tetap. titik tolaknya adalah pasal 263 (1) KUHP,

²³ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

²⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktiki Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian & Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (P3IH FH UMJ), Jakarta, Cetakan I, Desember 2009, hlm 316.

menentukan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ruang lingkupnya adalah dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya; hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung; terhadap putusan bebas, pelepasan dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diajukan peninjauan kembali; peninjauan kembali tidak dibatasi dengan waktu; permintaan peninjauan kembali atas terpidana atau ahli warisnya terhadap suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.²⁵

D. Kajian Umum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, untuk menjaga dan melindungi konstitusi, agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita- cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang

²⁵ Ibid, hlm 322.

stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan pada masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁶

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memberi landasan kerja bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam rangka penegakan konstitusi dan demokrasi. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sering dianggap sebagai hukum acara (hukum formal) atau hukum proses bagi penegakan konstitusi di Indonesia.²⁷

1. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang wewenang serta keanggotaan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) wewenang yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berikut ini.²⁸

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;

²⁶ Tri Anggara Putra, 2012, **Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 3.

²⁷ Acmad Surkati, **Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Di Tinjau Dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan Di Tiga Negara (Indonesia, Jerman, Thailand)**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa, Banten, 2014, hlm 2.

²⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki 1 (satu) kewajiban yang diatur dalam Pasal 24 C Ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:²⁹

- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a) Pengkhianatan terhadap negara;
 - b) Korupsi;
 - c) Penyuapan;
 - d) Tindak pidana berat lainnya;
- 2) Perbuatan tercela; dan/atau
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

Secara konstitusional, empat kewenangan dan satu kewajiban di atas merupakan manifestasi konkrit fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari tugas dan wewenang yang di berikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam hal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memilki sifat dan akibat hukum. Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat di bedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan

²⁹ Pasal 24 C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai perbuatan melwan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam pengujian Undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau ,meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan bagian Undang-undang, pasal atau ayat tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai final, dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.³² Hal ini di

³⁰ Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 240 – 242.

³¹ Maruar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan I, Januari 2011, hlm 212.

³² Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm 59.

pertegas dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:³³

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Namun sebagai syarat untuk di ketahui secara umum, putusan demikian, diumumkan dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:³⁴

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.”

Jika pemerintah atau lembaga Negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tata Negara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar Undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan

³³ Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

³⁴ Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

hukum mengikat adalah perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula.³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan didepan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial, sebagai berikut,³⁶

1.1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga Negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni:³⁷

“Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya.

³⁵ Maruar Siahaan, op.cit. hlm 213.

³⁶ Ibid, hlm 215.

³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihak-pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terikat dengan putusan mahkamah konstitusi.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*foreward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*).

Artinya segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno

terbuka untuk umum. Perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang belum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah perbuatan hukum yang sah secara hukum, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang sah itu, juga sah secara hukum.³⁸

1.2. Kekuatan Pembuktian

Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa: "*Materi muatan yang ayat, pasal, dan/ bagian dalam Undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk dapat diuji kembali.*"³⁹ Dengan demikian, adanya adanya putusan Mahkamah yang telah menguji suatu Undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat di gunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti.

Hal ini berarti putusan mahkamah konstitusi terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat digunakan sebagai bukti, karena sesuai

³⁸ Jimly Asshiddiqie, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hukum acara pengujian undang-undang, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan ke 2, Jakarta, 2006, hlm 319.

³⁹ Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus. Putusan mahkamah konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim dianggap telah benar (*resjudicata pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam putusan mahkamah konstitusi menguji undang-undang.

1.3. Kekuatan Eksekutorial

Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana di perintahkan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*"⁴⁰

⁴⁰ Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

E. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang akan di jelaskan dalam tabel sebagai berikut;⁴¹

Tabel 2
Tabel perbandingan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Perbedaan	Mahkamah Agung	Mahkamah Konstitusi
Kewenangan menurut UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadili pada tingkat kasasi 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang 3. Mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang <p>(Pasal 24A ayat [1] UUD 1945)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 3. memutus pembubaran partai politik 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum <p>(Pasal 24C ayat [1] UUD 1945)</p>
Tugas dan Wewenang menurut Undang-Undang yang Mengaturnya	<p>MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (Pasal 28 ayat [1] UU MA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan kasasi 2. Sengketa kewenangan mengadili. 3. Permohonan peninjauan kembali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

⁴¹ Tri Jata Ayu Pramesti, **Perbedaan Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi**, *hukum online.com (online)*, <http://mhukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi>, (22 februari 2015).

	putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	diberikan oleh UUD.
4.	Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).	3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jika kita lihat dari segi kewenangan yang di berikan Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi, dimana kewenangannya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang kewenangannya menyangkut urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak- adilan secara individuil dan konkrit.